

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi kementerian koordinator/kementerian negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemkot, pemkab serta lembaga lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu jenis satuan kerja perangkat daerah yang terbagi 4 bidang yaitu bidang sekretariat, bidang aset, bidang anggaran dan bidang perbendaharaan yang dapat di jelaskan tugas dalam setiap bidangnya yaitu dalam bidang sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik bidang aset mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi dan inventarisasi aset, pemanfaatan dan pemberdayaan aset serta pengamanan dan penghapusan aset untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan pengendalian pelaksanaan anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis di bidangnya.

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi pengelolaan kas daerah, penatausahaan belanja dan pembiayaan serta penatausahaan gaji daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Dari yang sudah di jelaskan tentang bidang yang ada di BPKAD tugas BPKAD secara garis besar ialah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang berprinsip hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak, untuk menjamin nilai nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik, tidak abstrak tapi konkret, prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai sipil dan otoritas publik serta dapat di pertanggung jawabkan untuk mencapai opini yang baik terhadap laporan keuangan pemerintah kota Bekasi.

BPKAD mengumpulkan laporan kegiatan tahunan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau unit dinas yang ada di kota Bekasi salah satu nya adalah Disperkimtan(dinas perumahan, permukiman dan kehutanan) merupakan unit dinas yang dalam melaksanakan kegiatan nya tidak terlepas dari jasa – jasa yang di gunakan baik dari segi perbaikan, penyewaan, pemeliharaan serta jasa lainnya yang termasuk pajak penghasilan pasal 23.

Dalam pemotongan dan penyetorannya Disperkimtan (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan) ini dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan pembayaran langsung atau yang disebut LS. Yang di maksud dengan sistem pembayaran langsung (LS) jika pembayaran dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerjaa, surat keputusan, surat tugas perintah kerja laainnya melalui peneribitan Surat Perintah Membayar Langsung. Sedangkan yang kedua dengan Sistem GU (Ganti Uang) yang dilakukan jika pertanggungjawaban uang belanja melalui

persediaan yang di terima oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu untuk membiayai kegiatan operasional.

Peraturan mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang terbaru di atur dalam UU No. 36 tahun 2008. Dimana pemotong PPh 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan nyaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penghasilan yang di potong dalam PPh 23 seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta imbalan dan tarif pemotongan dalam pph 23 diantaranya sebesar 15% dan 2% di bebaskan pada jenis penghasilan lainnya.

Dalam penelitian yang di lakukan untuk melihat kesesuaian prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di Disperkimtan (Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan) yang memakai 2 metode yaitu GU (Ganti Uang) dan LS (langsung) apakah sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 serta melihat kesesuaian dalam perlakuan akuntansi nya pada Dinas Perumahan,Permukiman, Permukiman dan Pertanahan(Disperkimtan) apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan uraian diatas maka penelliti tertarik mengambil judul penelitian **”Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan di jadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini ada lah sebagai berikut :

1. Apakah perlakuan akuntansi pemotongan PPh 23 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ?
2. Apakah prosedur pemotongan pajak penghasilan PPh 23 sudah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pemotongan PPh Pasal 23 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemotongan PPh pasal 23 menurut UU No. 36 Tahun 2008. Pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori tentang analisis perlakuan akuntansi dan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah di peroleh di bangku perkuliahan

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perusahaan mengenai Perlakuan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Prosedur Pemotongan PPh 23 sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi .

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini untuk menambah referensi penelitian khususnya di dalam kampus maupun di luar kampus tentang perlakuan akuntansi dan prosedur pemotongan pajak penghasilan 23

1.5 Batasan Masalah

Agar masalah yang di bahas tidak terlalu luas dan sesuai dengan penelitian yang di bahas maka di buat pembatasan masalah yaitu hanya mencakup tentang analisis perlakuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan

prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menurut UU No. 36 Tahun 2008. Pada BPKAD khususnya pada Unit Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan untuk tahun penelitian 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran pembahasan secara singkat dari masing-masing bab, yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Gambarannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis penjelasan tentang perlakuan akuntansi dan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi dari objek penelitian, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, penyajian data, hasil analisis data dan hasil pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan implikasi manajerial terhadap perusahaan.

